Istaryatiningtias_Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Sekolah dasar di Kota Administrasi Jakarta Barat

by Istaryatiningtias Uploaded By Nisa

Submission date: 22-Dec-2020 01:01PM (UTC+0700)
Submission ID: 1480425617
File name: 4859-Article_Text-15019-2-10-20201029_1_-_istaryati_ningtias.pdf (140.78K)
Word count: 2323
Character count: 15426

Jurnal Solma
Vol. 09, No. 2, pp. 00-00; 2020
Doi: http://dx.doi.org/10.22236/solma.v9i2.4859

ISSN (Print): 2252-584x
ISSN (Online): 2614-1531

Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Sekolah dasar di Kota Administrasi Jakarta Barat

Ihsana El Khuluqo[1*] dan Istaryatiningtias[1]

[1]Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jl. Limau II, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

*Email Korespondensi: ihsana_khuluqo@uhamka.ac.id

Abstrak

Pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala sekolah dasar di Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga tidak terlibat konflik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan tentang penyusunan dan penulisan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang baik merujuk pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan persuasif. metode ini digunakan karena dinilai tepat dalam melakukan analisis situasi dan menemukan permasalahan serta solusi dari permasalahan tersebut. Pelaksanaan Pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala sekolah dilaksanakan di Sekolah Dasar Meruya Utara 02 dengan diikuti oleh 12 Sekolah Dasar yang terdiri atas kepala sekolah dan juru bayar sekolah dasar negeri di kota administrasi Jakarta Barat. Hasil pelatihan ini yaitu kepala sekolah dan juru bayar sekolah mengetahui dimana letak kesalahan-kesalahan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah terkait dengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta memberi pengetahuan terkait panduan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah berdasarkan aturan baku pemerintah..

Kata kunci: Laporan pertanggungjawaban keuangan; dana BOS; dana BOP; KJP

Abstract

Training on making financial accountability reports for primary school principals in the Administrative City of West Jakarta was carried out with the aim of reducing or even eliminating mistakes that occurred in the preparation of financial accountability reports so as not to get into conflict with the Supreme Audit Agency (BPK). This training was conducted with the aim of providing insight into the preparation and writing of a good Financial Accountability Report with reference to applicable regulations. The method used is by using qualitative methods through a persuasive approach. This method is used because it is considered appropriate in analyzing the situation and finding problems and solutions to these problems. The implementation of the training for the preparation of the principal's financial accountability report was carried out at Meruya Utara 02 Elementary School, attended by 12 elementary schools consisting of school principals and public elementary school officers in the administrative city of West Jakarta. The results of this training are that school principals and school payers know where the mistakes are in the preparation of school financial accountability reports related to Education Operational Assistance (BOP) funds, School Operational Cost (BOS) funds and the Jakarta Smart Card (KJP) and provide related knowledge. guidelines for preparing school financial accountability reports based on government standard regulations.

Keywords: *Financial Accountability Report; BOS fund; BOP fund, KJP*

Format Sitasi: El Khuluqo, I., Istaryatiningtias. (2020). Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Sekolah dasar di Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Solma*. Vol. 09(2): 452-457. Doi: http://dx.doi.org/10.22236/solma.v9i2.4859

Submit: *04 Maret 2020* | Revisi: *21 September 2020* | Diterima: *30 Oktober 2020*

© 2020 Oleh authors. Lisensi Jurnal Solma, LPPM-Uhamka, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC BY) license. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dimulai pada saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, pendidikan telah dimasukkan sebagai salah satu hak asasi manusia. hal ini telah diakui di seluruh negeri bahwa setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan. Selanjutnya, ditentukan bahwa "hak atas pendidikan harus dicapai atas dasar persamaan kesempatan" (Unicef, 2007). Membiayai pendidikan sesuai dengan hak asasi manusia, pemerintah memiliki alokasi khusus untuk sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan hak atas pendidikan merupakan masalah kebijakan keuangan sekolah. sekolah umum adalah tanggung jawab pemerintah. (BenDavid-Hadar, 2016). Laporan keuangan juga berhubungan dengan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan entitas (Wisdom et al., 2017) sedangkan pelaporan keuangan sama-sama dipandang sebagai prosedur pengungkapan keuangan (Francis & Samuel, 2015). Tidak hanya itu, pelaporan keuangan merupakan proses formal dalam mengkomunikasikan keuangan aktivitas bisnis kepada pemangku kepentingannya (Al-Dmour et al., 2018).

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pemakaian dana sekolah yang berasal dari bantuan pemerintah untuk keberlangsungan proses belajar dan mengajar di sekolah. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah terkait laporan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu prinsip pelaporan yaitu mengedapankan pentingnya tepat waktu. Sesuai dengan prinsip tersebut laporan keuangan perlu koordinasi dari berbagai pihak seperti dokumen dari berbagai sumber serta penginputan dokumen tersebut agar penyelesaiannya tepat waktu sehingga tidak menumpuk dan terbangkalai. Namun selain tepat waktu dalam penyelesaian laporan keuangan harus akurat dengan kesalahan minimal. Kesalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan dapat menjadi masalah besar jika diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sistem pengendalian manajemen penting untuk praktik manajemen keuangan di sekolah. Ini mengikuti praktik manajemen keuangan yang komprehensif, yang secara langsung akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan maksimalisasi nilai sekolah (Azhar, 2008). Sistem pengendalian internal diartikan sebagai kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan perlindungan aset organisasi dan keandalan pelaporan keuangan (Hamzah & Ihsanul, 2007). Sistem pengendalian internal memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan ketepatan waktu laporan keuangan (Changchit et al., 2001; Jokipii, 2010).

Akuntabilitas keuangan di sekolah terkait dengan kegiatan atau upaya untuk meyakinkan pemangku kepentingan tentang penggunaan sumber daya publik (Stewardship) dan untuk mendukung pengambilan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya seperti waktu, personel, ruang, peralatan dan uang. Alokasi sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dan oleh karena itu seluruh operasi dan keberhasilan

sekolah sering kali bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu jelas bahwa sekolah harus memberikan informasi tentang kegiatan keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mengeluarkan akuntabilitas keuangan.

Keuangan sekolah adalah bidang yang luas dan berkembang yang mencakup tiga fungsi yang berhubungan dengan sumber daya; meningkatkan pendapatan, mengalokasikan sumber daya, dan menggunakan sumber daya; semuanya memberikan kesempatan pendidikan dan menghasilkan hasil pendidikan. Semua aktivitas ini terjadi dalam konteks tujuan pendidikan dan nilai sosial yang lebih luas yang membentuk bagaimana sistem keuangan disusun dan dijalankan. (Rice et al., 2010)

Menyusun dan mengelolah laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu tugas dan kewajiban sekolah berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan harus menerapkan prinsip efisien dan efisiensi dari mulai penganggaran hingga pelaporan sehingga fana sekolah dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.

Anggaran adalah kumpulan dokumen yang menunjukkan alokasi dana untuk tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan berfungsi sebagai sarana untuk merencanakan dan mengendalikan penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Anggaran sekolah berkaitan dengan penyediaan barang dan pembayaran atas layanan tanpa memanfaatkan secara pribadi. Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran diperlukan otentikasi dan pelaporan (Phyliters et al., 2018)

Satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan akhir periode (neraca); 2) laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain untuk periode (laporan laba rugi); 3) laporan perubahan ekuitas untuk periode tersebut; 4) laporan arus kas untuk periode tersebut; dan catatan, yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Laporan auditor akan menyertai laporan keuangan jika diaudit. Meskipun setiap laporan keuangan memiliki tujuan tertentu, laporan tersebut sama pentingnya dan saling terkait. Laporan keuangan biasanya disajikan dengan basis komparatif (selama lebih dari satu tahun) agar pengguna dapat dengan mudah melihat perubahan. (Doussy & Doussy, 2014)

Informasi keuangan menjadi sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh banyak pihak untuk berbagai keperluan (Said et al., 2013). Hal ini dapat dijelaskan dengan teori pengungkapan sukarela yang berfokus pada akuntabilitas keuangan untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (Nishitani, 2009). Karena teori pengungkapan sukarela mengasumsikan bahwa sekolah dengan kinerja dan pengelolaan lingkungan yang baik cenderung melaporkan informasi lingkungan secara sukarela, itu akan menunjukkan apakah motif akuntabilitas keuangan mendasari praktik pelaporan lingkungan perusahaan.

Melihat situasi dann kondisi dilapangan, dimana masih banyak sekolah yang kurang mengerti terkait bagaimana melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan,

maka pelatihan ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada kepala sekolah dan juru bayar sekolah dasar negeri mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

MASALAH

Pembuatan laporan Pertanggungjawaban keuangan kepala Sekolah Dasar di wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat belum sesuai dengan standar prosedur dan aturan yang berlaku, penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan keuangan cenderung terlambat disampaikan serta sering terjadi ketidak validan antara data perencanaan dan data pelaksanaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan meliputi:

1. Pendekatan persuasif
   Dosen melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah mitra untuk mendalami masalah yang ada dalam proses penyusunan dan pelaporan.
2. Pelaporan hasil pendekatan
   Setelah melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah mitra, dosen menyusun laporan hasil kunjungan untuk merancang solusi terbaik pada masalah tersebut.
3. Pemeriksaan fisik
   Melaksanakan pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai solusi untuk sekolah mitra
4. Pencatatan dan pelaporan
   Melaporkan hasil pelatihan dalam bentuk laporan tertulis

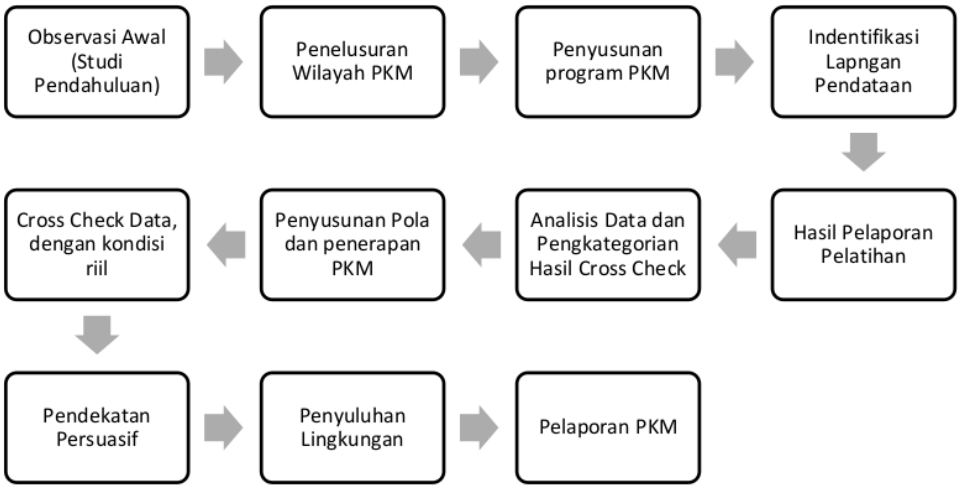

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan

PEMBAHASAN

Pelatihan ini dilaksanakan pada 18-19 Januari 2020 di Sekolah Dasar Negeri Meruya Utara dengan peserta yang berasal dari sekolah dasar negeri di kota administrasi Jakarta barat. Peserta pelatihan berjumlah 32 orang yang merupakan kepala sekolah dan juru bayar

sekolah. Peserta pelatihan diberikan wawasan berupa tatacara penyusunan dan penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan Badan Pemeriksa Keuangan. Peserta pelatihan di bentuk dalam kelompok-kelompok lalu diberikan soal dan harus dikerjakan. Berdasarkan hasil pengerjaan tersebut didapatkan hasil pemahaman setiap individu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Masih banyak kekeliruan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terutama pada bagian perhitungan beasiswa dan uang pensiun, hal ini tentunya menimbulkan masalah pada sistem keuangan serta menimbulkan kerugian.

Anggaran adalah kumpulan dokumen yang menunjukkan alokasi dana untuk tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan berfungsi sebagai sarana untuk merencanakan dan mengendalikan penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Anggaran sekolah berkaitan dengan penyediaan barang dan pembayaran atas layanan tanpa memanfaatkan secara pribadi. Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran diperlukan otentikasi dan pelaporan

KESIMPULAN

Pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat dengan tujuan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Peserta pelatihan menambah wawasan terkait panduan penyusunan laporan peranggungjawaban keuangan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang berlaku. Setelah pelatihan, Peserta pelatihan dapa tmempraktikan dan berbagi ilmu terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana kegiatan yaitu Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat serta pemberi dukungan penuh yaitu Sekolah Pascasarjana universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Dmour, A. H., Abbod, M., & Al Qadi, N. S. (2018). The impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic' attributes (type, size and experience). *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, *22*(1), 1–18.

Azhar, A. W. (2008). Financial Management of Mosques in Kota Setar District : Issues and Challenges. *Doctoral Dissertation, Universiti Utara Malaysia*.

BenDavid-Hadar, I. (2016). School finance policy and social justice. *International Journal of Educational Development*, *46*, 166–174. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.10.003

Changchit, C., Holsapple, C. W., & Madden, D. L. (2001). Supporting managers' internal control evaluations: An expert system and experimental results. *Decision Support Systems*, *30*(4), 437–449. https://doi.org/10.1016/S0167-9236(00)00127-5

Doussy, F., & Doussy, E. (2014). Financial statements and the discharging of financial accountability of ordinary public schools in South Africa. *Journal of Governance and Regulation*, *3*(2), 27–35. https://doi.org/10.22495/jgr_v3_i4_p3

Francis, U., & Samuel, S. (2015). Adoption of IPSAS and the Quality of Public Sector Financial Reporting in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, *6*(20), 141–149.

Hamzah, M. Z., & Ihsanul, F. (2007). IMAR.pdf. *The Indonesia Management and Accounting Research*, *6*(2).

Jokipii, A. (2010). Determinants and consequences of internal control in firms: A contingency theory based analysis. *Journal of Management and Governance*, *14*(2), 115–144. https://doi.org/10.1007/s10997-009-9085-x

Mohd Said, R., Sulaiman, M., & Nik Ahmad, N. N. (2013). Do fund managers perceive environmental information useful? An empirical study from Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, *52*, 281–288. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.038

Nishitani, K. (2009). An empirical study of the initial adoption of ISO 14001 in Japanese manufacturing firms. *Ecological Economics*, *68*(3), 669–679. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.05.023

Phyliters, M., Mulwa, A. S., & Kyalo, D. N. (2018). Financial Management for Effective Schools : Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County , Kenya ". *Www.Ijern.Com*, *6*(11), 1–18.

Rice, J. K., Monk, D. H., & Zhang, J. (2010). School finance: An overview. *International Encyclopedia of Education*, 222–228. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01241-0

Unicef. (2007). A Human Rights-Based Approach to Education for All. In *Practice*.

Wisdom, O., Damilola, E., & Opeyemi, A. (2017). Public sector accounting standards and quality of financial reporting: A case of Ogun state government administration in Nigeria. *Business and Management Research Journal*, *7*(7), 76–81.

Istaryatiningtias_Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Sekolah dasar di Kota Administrasi Jakarta Barat

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	2%
2	www.hartadinata.com Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 17 words
Exclude bibliography	On		